

PENGARUH BELANJA MODAL DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS

Anshor Wibowo, Monalisa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
bowriset@gmail.com, monalisa219@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of Capital Expenditure on Economic Growth with Regional Original Income as an Intervening Variable in Bengkalis Regency. The population in this study is the report of realization of the revenue and expenditure budget of Bengkalis Regency in 2013 to 2017, Sampling is done using the purposive sampling method and the number of samples is 12 items from regional original income in 2013 to 2017, 12 items of capital expenditure in 2013 to 2017 and economic growth 2013 to 2017. This research data is in the form of secondary data in the form of 2013 to 2017 Budget Realization Report in the Regional Government Financial Statements that have been examined by the Indonesian Financial Audit Board in 2013 to 2017. The results of this study are that capital expenditure has an effect on growing the economy, whereas capital expenditure indirectly influences regional economic growth through regional original income as an intervening variable.

Keywords: Capital Expenditure, Regional Original Revenue, Economic Growth.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening* pada Kabupaten Bengkalis. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2017, Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan jumlah sampel 12 item dari pendapatan asli daerah tahun 2013-2017, 12 item belanja modal tahun 2013-2017 dan pertumbuhan ekonomi 2013-2017. Data Penelitian ini berupa data sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran tahun 2013-2017 yang ada pada laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tahun 2013-2017. Hasil dari penelitian ini adalah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening*.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumberdaya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari ekonomi daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran ekonomi pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang ekonominya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Belanja Modal merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan yang tertuang dalam kinerja keuangan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka Belanja Modal yang dilakukan terlaksana dengan baik (Bastian 2016). Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan Belanja Modalnya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka Belanja Modalnya jelek. Ekonomi adalah suatu ukuran Belanja Modal yang menggunakan indikator keuangan. Analisis ekonomi pada dasarnya dilakukan untuk menilai Belanja Modal di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi Belanja Modal yang akan berlanjut.

Ekonomi adalah suatu ukuran Belanja Modal yang menggunakan indikator keuangan. Analisis ekonomi pada dasarnya dilakukan untuk menilai Belanja Modal di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi Belanja Modal yang akan berlanjut. Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur ekonomi ada beberapa ukuran Belanja Modal, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan (Halim 2013, 199).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi daerah dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta

belanja modal dapat dijadikan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil laba usaha daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Komponen PAD tersebut secara penuh dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, disamping itu memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini semakin leluasa dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota setelah diberlakukan otonomi daerah. Sumber penerimaan lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta penerimaan lainnya, dan penerimaan pinjaman daerah (Harianto dan Priyo 2007).

Pemerintah Daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis Belanja Modal pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim 2013, 148). Penggunaan analisis rasio keuangan secara luas telah digunakan oleh *private sector*, sedangkan pada lembaga publik penggunaannya masih terbatas. Padahal dari hasil analisis dapat diketahui tingkat Belanja Modal Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi serta untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *intervening*.

TELAAH LITERATUR

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD (Kwedat 2008, 185-187). Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD

menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Komponen berikutnya dari APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Mardiasmo 2004, 60).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2008, dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan (RI 2004).

Pendapatan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (RI 2005).

Adapun sumber pendapatan daerah otonom menurut Halim (2004, 67) berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai UU No.33, penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam melakukan analisa perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsure utama dalam suatu pembangunan ekonomi dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, baik terhadap wilayahnya maupun terhadap wilayah lain (RI 2009).

Dalam Teori Klasik Adam Smith menyatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah akan memperluas pangsa pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Lebih lanjut, spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga meningkatkan upah dan keuntungan. Dengan demikian, proses pertumbuhan akan terus berlangsung sampai seluruh sumber daya termanfaatkan. Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Arlin dan Wagian 2007).

Pertumbuhan ekonomi dalam Sukirno (2006) sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu

tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Adisasmita 2011, 145).

Berdasarkan uraian teori di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:
Ha₁: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ha₂: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *intervening*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di BPKAD Kabupaten Bengkalis dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi serta PAD Kabupaten Bengkalis. Sampel dari penelitian ini adalah bagian dari jumlah populasi laporan keuangan laporan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi serta PAD kabupaten Bengkalis. Sedangkan besarnya sampel diperoleh dengan menggunakan rumus slovin. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif yang merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Adapun sumber data yang diambil dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda karena dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada dua yaitu belanja modal sebagai variabel X dan variabel Y adalah pertumbuhan ekonomi dan sebagai variabel *interveningnya* (Z) yaitu pendapatan asli daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

| Indikator | Tahun | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 37.585.201.687 | 88.473.234.804 | 51.035.362.940 | 47.854.327.923 | 71.781.060.155 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 45.690.964.527 | 75.207.904.171 | 59.794.690.236 | 31.188.867.751 | 14.565.502.467 |
| Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan | 21.669.071.425 | 32.254.667.667 | 37.902.960.213 | 21.238.125.981 | 31.492.480.950 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 76.721.979.549 | 57.411.514.111 | 110.156.518.826 | 98.754.329.313 | 154.026.552.334 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 324.820.101.650 | 698.411.896.004 | 1.057.385.058.350 | 1.175.781.702.243 | 1.378.704.957.739 |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 2.404.583.281.335 | 2.636.766.125.948 | 1.046.069.826.563 | 1.088.459.032.938 | 816.180.939.707 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 31.862.241.000 | 85.777.928.000 | 75.207.904.171 | 154.026.552.334 | 345.070.716.000 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 7.539.390.000 | 26.803.598.000 | 107.512.319.262 | 68.312.742.000 | 51.401.903.000 |
| Dana Penyesuaian | 89.444.556.000 | 100.996.073.000 | 199.323.741.000 | 199.687.548.625 | 210.619.354.173 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 47.194.826.854 | 175.809.699.434 | 111.814.989.237 | 107.213.477.450 | 107.512.319.262 |
| Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi | 21.825.060.000 | 7.116.600.000 | 11.031.891.200 | 37.779.386.335 | 49.426.893.669 |
| Jumlah | 3.108.936.674.027 | 3.985.029.241.139 | 2.867.235.261.998 | 3.030.296.092.893 | 3.230.782.679.456 |
| Rasio | 71,40 | 90,02 | 76,76 | 59,31 | 72,78 |

Berdasarkan tabel 1 di atas pemerintah mendapatkan sumber dana yang disebut pendapatan daerah dari berbagai pos pendapatan, dan beberapa pos dari pendapatan pada pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadi acuan besarnya kebijakan untuk menentukan rencana anggaran belanja modal daerah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data tersebut diatas untuk sebagai indikator dalam melihat apakah besaran realisasi anggaran belanja benar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten Bengkalis melalui pendapatan daerah.

Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Bengkalis

Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

| Indikator | Tahun | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Belanja Tanah | 2.116.953.000 | 3.167.869.485 | 6.321.458.567 | 956.105.657 | 801.075.000 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 187.348.898.814 | 221.882.895.872 | 138.374.874.051 | 132.791.166.536 | 129.291.601.656 |
| Belanja gedung dan Bangunan | 279.400.642.407 | 300.734.313.055 | 202.224.862.011 | 155.829.389.573 | 171.428.935.814 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 794.834.773.238 | 784.962.433.468 | 1.467.064.643.779 | 479.585.283.920 | 680.372.459.226 |
| Belanja Asset tetap lainnya | 7.076.936.000 | 5.167.032.766 | 1.718.111.850 | 5.580.999.760 | 390.375.000 |
| Belanja Asset lainnya | 930.613.000 | 402.940.500 | 801.075.000 | 535.800.000 | 1.071.594.860.216 |
| Belanja Pegawai | 1.064.772.356.887 | 1.071.594.860.216 | 1.137.104.595.781 | 1.046.900.038.190 | 966.190.476.031 |
| Belanja Barang dan jasa | 666.697.211.019 | 647.618.789.878 | 945.146.599.860 | 878.133.119.133 | 899.948.340.587 |
| Belanj Subsidi | 13.371.878.467 | 11.426.172.236 | 11.652.000.000 | 4.853.979.665 | 14.561.938.995 |
| Belanja Hibah | 276.252.906.500 | 103.059.904.800 | 123.263.703.053 | 78.442.809.950 | 28.460.755.000 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2.901.700.000 | 4.898.400.000 | 535.800.000 | 1.071.594.860.216 | 2.116.953.000 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 390.698.247.000 | 389.726.417.279 | 502.359.857.991 | 365.216.020.611 | 325.409.752.066 |
| Total | 3.686.403.116.332 | 3.544.642.029.555 | 4.536.567.581.943 | 4.220.419.573.211 | 4.290.567.522.591 |
| Rasio | 62,54 | 61,11 | 83,33 | 62,68 | 69,30 |

Berdasarkan tabel 2 kebutuhan anggaran dan belanja untuk pemerintah Kabupaten Bengkalis diatas adalah refleksi dari besarnya pendapatan yang dihasilkan pemerintah kabupaten, dengan besaran pendapatan tersebut maka pemerintah kabupaten membuat dan merencanakan kebutuhan belanja daerah dengan berbagai indikator seperti di atas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data tersebut diatas untuk sebagai indikator dalam melihat apakah besaran realisasi anggaran belanja benar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis

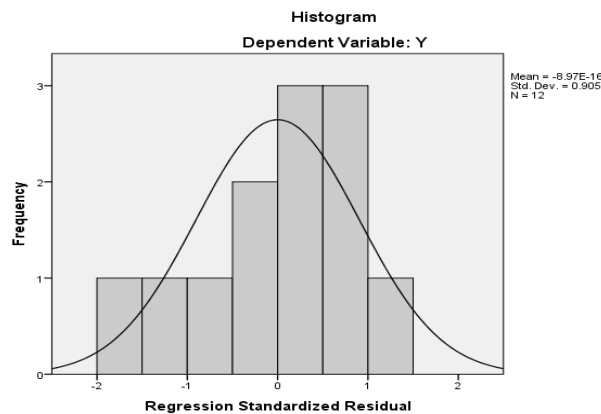
Tabel 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

| Sektor PDB | PDRB Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Konstan | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.01 | 4.06 | 0.03 | 3.65 | 5.24 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | -6.15 | -7.37 | -5.07 | -6.15 | -6.66 |
| C. Industri Pengolahan | 4.87 | 5.68 | 2.99 | 6.75 | 10 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 4.03 | 9.47 | 4.65 | 17.42 | 4.87 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0.78 | 1.69 | 2.86 | 1.45 | 9.51 |
| F. Konstruksi | 8.36 | 6.96 | 8.84 | 5.82 | 6.93 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7.96 | 4.77 | 1.88 | 5.22 | 6.01 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 7.46 | 7.39 | 4.83 | 2.98 | 8.10 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 18.46 | 10.32 | 2.55 | 2.56 | 4.37 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 20.02 | 12.33 | 8.01 | 4.95 | 5.43 |
| K. Jasa keuangan dan Asuransi | 7.12 | 0.96 | -5.51 | 8.92 | -2.18 |
| L. Real Estat | 4.15 | 3.28 | 6.57 | 1.47 | 3.32 |

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari produk *domestic bruto* atau yang biasa disebut PDB. PDB Kabupaten Bengkalis memiliki 12 sektor untuk menunjang perekonomian di Kabupaten Bengkalis. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan demikian secara kumulatif persentasasi dapat dilihat dari tabel 3 diatas bahwa PDB merupakan hal penting yang tidak dapat dilihat begitu saja, mengapa demikian karen PDB merupakan acuan dasar dalam menyusun RAPBD yang dalam hal ini 12 sektor PDB. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan 12 Sektor tersebut sebagai indikator untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah.

Hasil Uji Normalitas

Gambar 1 Grafik Histogram



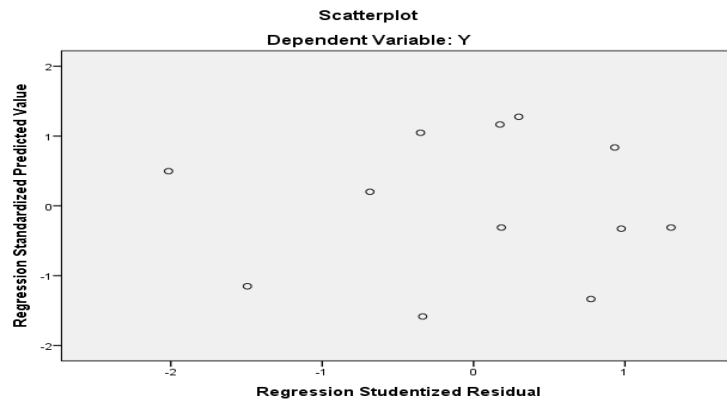
Sumber: output SPSS

Berdasarkan gambar 1 di atas maka dapat dilihat dengan nilai *skwenes* berada di 2,8 dan (-2,8) pada sumbu X dan pada sumbu Y kurtosis berada pada nilai 2,8. Hal ini menandakan tingkat simetris antara *skwenes* dan *kurtosis* memiliki keseimbangan dimana grafik berbentuk simetris lonceng.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas scatterplot* berfungsi untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya. Dalam analisis statistik ada beberapa cara untuk bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas. Pengujian yang baik seharusnya tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan: jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka adanya gejala *heteroskedastisitas*. Jika tidak ada pola yang jelas, titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak adanya gejala *heteroskedastisitas*.

Gambar 2 Grafik Heteroskedastisitas Scatterplots



Sumber: output SPSS

Berdasarkan pada gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dapat dikatakan bahwa tidak adanya gejala *heteroskedastisitas*.

Hasil Uji *Multikolinearitas*

Uji *multikolinearitas* bertujuan untuk menguji apakah, suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel *independen*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel *independen*. Pengujian *multikolinearitas* dilihat dari besaran VIF (*Variance Iflation factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel *independen* yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya *multikolinearitas* dan tidak adanya *multikolinearitas* sebagai berikut:

Tabel 4 Uji *Multikolinearitas*

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 8.201 | 8.586 | | 4.955 | .002 | | |
| | LN10_X | .171 | .247 | .103 | 2.692 | .004 | .761 | 1.315 |
| | LN10_Z | .958 | .147 | .967 | 6.500 | .000 | .761 | 1.315 |

a. Dependent Variable: LN10_Y

Sumber: output SPSS

Berdasarkan tabel 4 uji *multikolinieritas* menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel Belanja Modal (X) sebesar 0,761 lebih besar dari 0,10. Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (Z) sebesar 0,761 lebih besar dari 0,10. Maka artinya tidak terjadi *multikolinearitas* terhadap data yang diuji. Sementara untuk nilai VIF variabel Belanja Modal (X) yakni 1,315 lebih kecil dari 10,00, sedangkan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (Z) yakni 1,315 juga lebih kecil dari 10,00. Maka artinya tidak terjadi *multikolinearitas* terhadap data yang diuji.

Hasil Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dan rumusan masalah, penelitian menggunakan uji t masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk melihat pengaruh variabel *independen* terhadap *dependen*, uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Tabel 5 Uji t
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 8.201 | 8.586 | | 4.955 | .002 |
| | X | .171 | .247 | .103 | 2.692 | .004 |
| | Z | .958 | .147 | .967 | 6.500 | .000 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: output SPSS

Diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % dan df (derajat kebebasan) atau t_{tabel} $n-k-1 = 10$ Berikut adalah hasil perhitungan nilai t_{tabel} dan taraf signifikansinya dalam penelitian ini dalam uji dua arah: $df = n - k - 1 = 12 - 1 - 1 = 10$; $Sig = \alpha/2 = 0,05//2 = 0,025$; Keterangan: n: Jumlah, k: Jumlah variabel bebas, 1: Konstant.

Berdasarkan tabel 5 uji t di atas, pengujian hipotesis ke-1 dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) atau t_{tabel} , $n-k-1 = 10$ adalah 2,228. Nilai t_{hitung} 2,692 > t_{tabel} 2,228, sedangkan berdasarkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,04 < 0,05. Sehingga dapat dikatakan H_{a1} diterima dan dinyatakan terdapat pengaruh antara Belanja Modal (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) pada Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan tabel 5 uji t di atas, pengujian hipotesis ke-2 dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) atau t_{tabel} , $n-k-1 = 10$ adalah 2,228. Nilai t_{hitung} 6,500 > t_{tabel} 2,228, sedangkan berdasarkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,02 < 0,05. Sehingga dapat dikatakan H_{a2} diterima dan dinyatakan terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (Z) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) pada Kabupaten Bengkalis.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (*R Square*) dalam regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel *independen* (X) terhadap variabel *dependen* (Y). Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel *independen* dapat menjelaskan variabel *dependen*. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel *independen* dalam menjelaskan variabel *dependennya*.

Tabel 6 Uji Koefisien Deteminasi R Square

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .921 ^a | .849 | .815 | 2.86880 |

a. Predictors: (Constant), LN10_Z, LN10_X

b. Dependent Variable: LN10_Y

Sumber: output SPSS

Berdasarkan tabel 6 menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,921 yang artinya adanya hubungan korelasi yang kuat. Nilai R Square sebesar 0,849 atau 84,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh kontribusi Belanja Modal (X) melalui Pendapatan Asli Daerah (Z) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah sebesar 84,9%. Sedangkan sisanya sebesar 15,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam model penelitian ini seperti faktor pendapatan yang sah, pendapatan dana darurat, bantuan keuangan pemerintah propinsi dan pendapatan lainnya.

Hasil Uji Analisis Jalur

Analisis jalur suatu teknik pengembangan dari regresi linier ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X dan terhadap Y serta dampaknya terhadap Z. Koefisien arah jalur dinyatakan dengan huruf ρ yang juga menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap variabel X melalui intervensi variable Z sebesar satu bagian. Maksudnya, bila harga ρ positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau penambahan. Sebaliknya bila ρ negatif, maka variabel Y akan mengalami penurunan.

Tabel 7 Uji Analisis Jalur

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 8.201 | 8.586 | | 4.955 | .002 |
| | X | .171 | .247 | .103 | 2.692 | .004 |
| | Z | .958 | .147 | .967 | 6.500 | .000 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: output SPSS

Dari tabel 7 diatas, di ketahui nilai *constant* (a) sebesar 4,955. Sedangkan *koefisien regresi* (b) nilai Belanja Modal (X) sebesar 0,103, untuk nilai Pendapatan Asli Daerah (Z) sebesar 0,967. Sehingga persamaan jalurnya dapat ditulis:

$$Y = \rho_{yx} X + \varepsilon_1$$

$$Y = 0.103X + \varepsilon_1$$

Dimana: X: Belanja Modal, Y: Pertumbuhan Ekonomi, ε : Epsilon.

Nilai *constant* (a) sebesar 4,955 yang mengandung arti nilai konsisten variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 4,955. Untuk nilai *koefisien* Belanja Modal (X) sebesar 0,103 menyatakan bahwa jika Belanja Modal (X) bertambah,

maka nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,103, sehingga nilai *koefisien regresi* tersebut bernilai positif. Untuk nilai *koefisien* Pendapatan Asli Daerah (Z) sebesar 0,967 menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (Z) bertambah, maka nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,967, sehingga nilai *koefisien* analisis jalur tersebut bernilai positif.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 2.692 > t_{tabel} 2,228$, sedangkan berdasarkan nilai signifikansi uji t sebesar $0,04 < 0,05$. Sehingga dapat dikatakan H_{a1} diterima dan dinyatakan terdapat pengaruh antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam hal ini mengapa terdapat pengaruh karena Belanja Modal yang disalurkan merupakan faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi Belanja Modal yang dibelanjakan pemerintah Kabupaten Bengkalis semakin tinggi juga fasilitas umum yang didapatkan berupa jalan, irigasi, jaringan infrastruktur dan lain-lain.

Intervensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 6.500 > t_{tabel} 2,250$, sedangkan berdasarkan nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat dikatakan H_{a2} diterima dan dinyatakan terdapatnya intervensi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam hal ini mengapa terdapat intervensi karena besaran dana yang masuk ke pemerintah daerah merupakan acuan dasar untuk melakukan belanja asset daerah.

Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai R yaitu sebesar 0,921 yang artinya adanya hubungan yang kuat antar variabel. Kemudian nilai $R Square$ sebesar 0,849 atau 84,9%, hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh kontribusi Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 84,9%. Sedangkan sisanya sebesar 15,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Terdapatnya pengaruh antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyalurkan belanja daerah cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dengan kata lain semakin besar asset yang dibelanjakan maka semakin besar daya Tarik investasi luar daerah ke dalam daerah yang menyebabkan besarnya pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kemudian terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel *intervensi* yang sangat besar, terbukti dari nilai hitung intervensinya. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah, maka akan besar pula anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17.
- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan antara pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota SeJawa-Bali)." *Symposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Adi, Priyo Hari. 2011. "Hubungan Antara Pertumbuhan Perekonomian Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah". *Symposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Daerah*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Adi, Priyo Hari dan Puspa Dewi Ekaristi. 2009. "Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6 (1), 1-19.
- Amin, Nurul. 2013. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2 (1), 434-442.
- Andaiyani. 2013. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat". *Jurnal Ekonomi Daerah* 1 (1).
- Arlin, I Dan G.H. Wagian. 2007. "Kemampuan keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi". *The I National Accounting Conference*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Astuti. 2014. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Produk Domestik Regional Bruto 2007*. Kabupaten Bengkalis.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto 2008*. Kabupaten Bengkalis.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Produk Domestik Regional Bruto 2009*. Kabupaten Bengkalis.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. *PDRB Kabupaten/Kota di Kabupaten Bengkalis 2003-2017*. Diakses dari: www.bengkaliskab.bps.go.id
- Bastian, Indra. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indexs.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP NAMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah* Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIEM YKPM.

- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita". *Simposium Nasional Akuntansi*. Makassar.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indriyani, Devi Asih. 2013. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal".
- Jaya, Gde Bhaskara Perwira dan Anak Agung Bagus Putu Widanta. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3 (5), 201-208.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika Dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi". *E-Jurnal Akuntansi* 7 (1), 79-92.
- Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementrian Dalam Negeri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Erwan Agus Purwanto. 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja Konsep Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UGM.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Kwedat, Warsito. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: UNDIP.
- Latief, Dochak. 2002. *Pembangunan Ekonomi & Kebijakan Ekonomi Global*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
- Mankiw, Gregory. N. 2013. *Pengantar Ekonomi*, Edisi Kedua Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Mantayani, Ida dan Rusmanto. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal". *InFestasi: Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 9 (2), 91-102.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak Daerah*. Yogyakarta: UU-Press.
- Purwanto, Didik. 2015. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Realisasi Belanja Modal". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 11 (2), 263-271.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004a. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Sidik, Machfud. 2002. *Dana Alokasi Umum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sugiono. 2012. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sudono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sudono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Makalah dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua. Jakarta : Kencana.
- Sukirno, Sadano. 2008. *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2001. *Ekonometrika Pengantar*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Tuasikal, Askam. 2008 Pengaruh DAU, DAK, PAD, DAN PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 1 (2), 142-155.
- Walidi. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal sebagai Intervening Variabel (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Utara)*. Tesis. Sekolah Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).
- Wertianti, I.G.A. Gede dan A.A.N.B. Dwirandra. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi". *E-Jurnal Akuntansi* 4 (3), 567-584.